

## DAFTAR PUSTAKA

- Anggarini Yunita, dan Puranta B.H. 2010. Anggaran Berbasis Kinerja: Penyusunan APBD Secara Komprehensif, Edisi Pertama, UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Assidiqi Bahrun. 2014. Analisis Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Klaten Tahun 2008-2012, Skripsi, Universitas Negeri Yogyakarta.
- Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rote Ndao. 2021. Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao dalam Tahun.
- Bahrun, A.2014. Analisis Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Klaten Tahun 2008-2012. Skripsi, Universitas Negeri Yogyakarta.
- Bastian Indra. 2007. Sistem Akuntansi Sektor Publik, Edisi 2, Salemba Empat, Jakarta.
- BPS Kabupaten Rote Ndao. 2021. Kabupaten Rote Ndao dalam Angka 2021. Kabupaten Rote Ndao.
- Erlina, Rambe, S. O., & Rasdianto. 2015. Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim Abdul. 2004. Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah, Salemba Empat, Jakarta.
- Halim Abdul, dan Iqbal Muhammad. 2012. Seri Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah, Edisi Ketiga, UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Halim, A., & Kusufi, S. M. 2014. Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat.
- Kainde Christian. 2012. Analisis Varians dan Pertumbuhan Belanja Daerah pada Pemerintah Kota Bitung, Jurnal EMBA Vol.1 No.3 Juni 2013 Hal. 393-400, Universitas Sam Ratulangi Manado.
- Oki, Kamilaus, dkk. 2020. Analisis Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Belu. Jurnal Ekonomi Pembangunan. Vol 5. No 2
- Mahmudi. 2010. Manajemen Keuangan Daerah, Erlangga, Jakarta.
- Mahmudi. 2016. Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Edisi Ketiga, UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Mahsun Muhamad. 2006. Pengukuran Kinerja Sektor Publik, Edisi Pertama, BPFE, Yogyakarta.

- Marizka Addina. 2009. Analisis Kinerja Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Medan, Skripsi, Universitas Sumatera Utara.
- Mutakin, Eky, dkk. 2021. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kaputaen Langkat. *Economis, Business and Management Science Journal*. Vol 1. No 1
- Nursalam. 2017. Metodologi Penelitian Ilmu Keperawatan: Pendekatan Preaktik. Selemba Medika
- Peraturan Menteri dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
- Putri, Rizki, dan Mundar, Agus. 2021. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun 2016-2020. *Jurnal Ilmiah MEA*. Vol 5. No 31
- Ratmono Dwi, dan Sholihin Mahfud. 2015. Akunatansi Keuangan Daerah Berbasis Akruial, UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Sangadji E.M., dan Sopiah, 2010, Metode Penelitian – Pendekatan Praktis dalam Penelitian, Edisi I, ANDI, Yogyakarta.
- Sanusi, Anwar. 2014. Metodologi Penelitian Bisnis. Jakarta: Salemba 4.
- Sekaran, Uma. 2017. Metode Penelitian untuk Bisnis. Jakarta: Salemba empat.
- Sekaran, Uma dan Roger Bougie, 2017. Metode Penelitian untuk Bisnis: Pendekatan Pengembangan-Keahlian. Jakarta: Salemba Barat
- Sugiyono. 2018. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung : Alfabeta
- Sugiyarto, Eko. 2015. Menyusun Proopsal Penelitian Kualitatif Skripsi dan Tesis. Yogyakarta: Suaka media
- UU Republik Indonesia. Undang-Undang No 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- Undang-Undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Undang-Undang No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- Undang-Undang No 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Undang-Undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah.

Yuwono, dkk. 2005. Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia. Jakarta: Rajagrafindo Persada.